

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

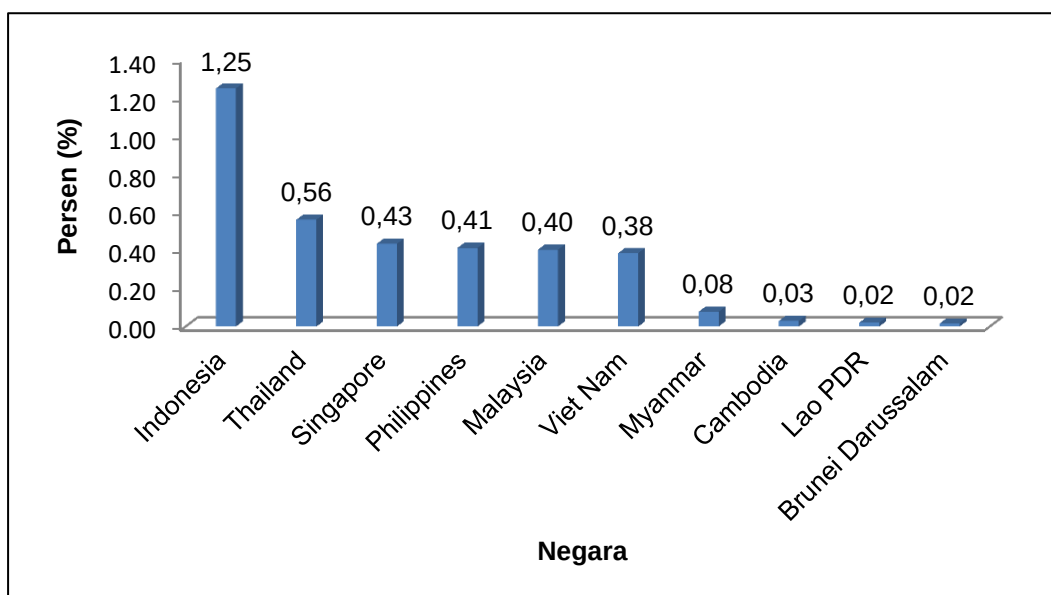
Isu aktivitas ekonomi menjadi topik yang penting dikalangan ekonom. Isu aktivitas ekonomi merujuk pada permasalahan yang berkaitan dengan keadaan ekonomi suatu negara pada waktu tertentu. Keadaan ekonomi yang dimaksud seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi dalam sasaran, pengangguran yang rendah, korupsi rendah, stabilitas politik, dan neraca perdagangan. Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan suatu negara memiliki tujuan untuk menjaga aktivitas ekonomi (Pramesti, 2019).

Salah satu kawasan yang perlu diteliti terkait aktivitas ekonomi yaitu kawasan ASEAN. Hal ini karena negara-negara tersebut bekerja sama dalam menciptakan kemajuan dan mencapai kesejahteraan sehingga aktivitas ekonomi ASEAN berdampak pada kegiatan ekonomi global, maka dari itu kontribusi kawasan tersebut terhadap perekonomian global diharapkan memiliki pengaruh yang dapat diperhitungkan. Peran strategis ASEAN dalam mendorong perdamaian dan kesejahteraan dunia juga penting, karena kawasan ini menjadi landasan kemajuan dan stabilitas ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Pengaruh ASEAN terhadap dunia juga terlihat dari kepemimpinannya dalam Forum Regional ASEAN dan peran perintisnya dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Dinda, 2014).

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) merupakan wadah bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama tersebut. Pendiri dari organisasi ini terdiri dari perwakilan negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura yang kemudian dikenal dengan sebutan ASEAN-5.

Kawasan tersebut dapat menjadi *role model* dalam hal kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam menghadapi suatu permasalahan (Sapitri & Suhartini, 2022).

Indikator aktivitas ekonomi pertama yaitu pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDB. Definisi dari Produk Domestik Bruto (PDB) adalah variabel ekonomi yang mengukur nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu periode tertentu (Fernando, 2023). PDB digunakan sebagai indikator aktivitas ekonomi karena digunakan untuk mengukur kekuatan ekonomi antar negara (Harerio, 2009). Selain itu, PDB juga digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara.



Sumber: *World Bank*, 2022, data diolah

Gambar 1.1.
Rata-Rata Kontribusi PDB Kawasan ASEAN Terhadap Pembentukan PDB Dunia Tahun 2018-2022

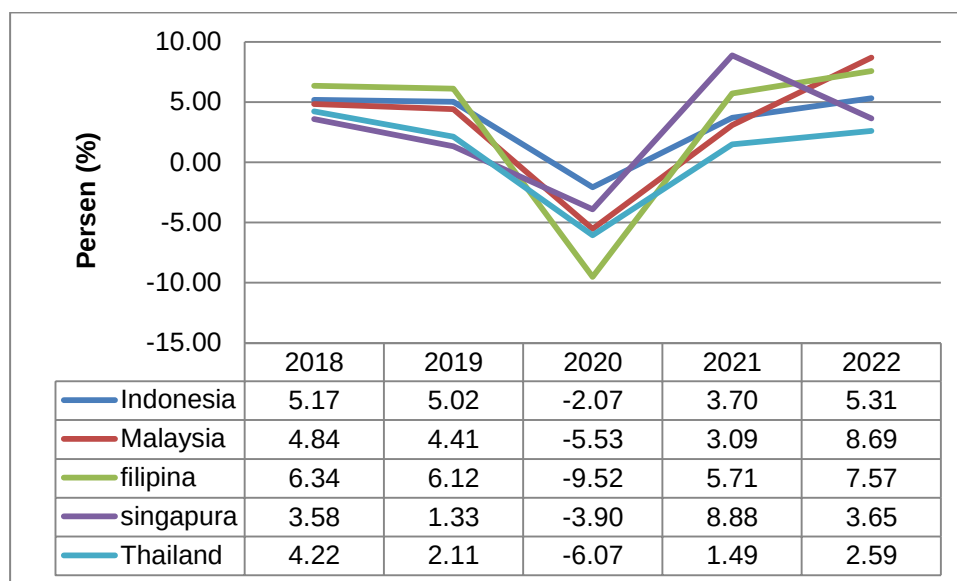
Gambar 1.1. menunjukkan bahwa kawasan ASEAN memiliki rata-rata kontribusi yang masih rendah terhadap pembentukan PDB dunia. Hal ini memiliki arti bahwa secara ekonomi kekuatan ASEAN terhadap ekonomi dunia masih kurang berkontribusi untuk PDB Dunia. Kontribusi kawasan ASEAN terhadap dunia masih rendah karena dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Meskipun

kawasan ASEAN merupakan salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat secara global, pertumbuhan ekonominya diperkirakan akan melambat di tahun-tahun mendatang. Kinerja perekonomian kawasan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kondisi perekonomian global, kebijakan moneter, dan dinamika geopolitik, termasuk persaingan perdagangan AS-Tiongkok. Selain itu, tingkat pendapatan yang beragam di antara 10 negara anggota ASEAN juga dapat berdampak pada kontribusi keseluruhan terhadap PDB dunia. Meskipun merupakan negara dengan perekonomian terbesar kelima di dunia, pertumbuhan ekonomi kawasan ini diperkirakan akan melambat, sehingga dapat mempengaruhi kontribusinya terhadap PDB global (Elms, 2020).

Gambar 1.1. juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kontribusi paling tinggi dibandingkan kawasan ASEAN lainnya. Secara rata-rata kontribusi PDB Indonesia sebesar 1,25 persen. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki peran dan pengaruhnya yang strategis di kawasan. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat di ASEAN dan negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk visi, arah, dan tujuan ASEAN, serta mendorong integrasi, keamanan, dan stabilitas regional. Indonesia juga menjadi pemimpin dalam mendorong upaya keberlanjutan di ASEAN, khususnya dalam manajemen bencana, polusi asap lintas batas, dan konservasi keanekaragaman hayati. Selain itu, Indonesia juga berperan penting dalam mendorong kebijakan perdagangan bebas dan meningkatkan integrasi ekonomi dalam ASEAN (Saptati, 2023).

Kontribusi paling rendah di kawasan ASEAN dalam pembentukan PDB dunia yaitu Brunei Darussalam. Secara rata-rata kontribusi PDB negara Brunei Darussalam dalam pembentukan PDB dunia sebesar 0,02 persen setara dengan

negara Laos. Negara Brunei Darussalam memiliki kontribusi rendah terhadap pembentukan PDB dunia karena ketergantungannya pada sektor minyak dan gas alam. Sektor ini mendominasi ekonomi Brunei, sehingga fluktuasi harga minyak dunia dapat berdampak signifikan pada perekonomiannya. Selain itu, populasi yang relatif kecil dan diversifikasi ekonomi yang terbatas juga turut berperan dalam kontribusi rendah terhadap pembentukan PDB dunia.



Sumber: *World Bank*, 2022, data diolah

Gambar 1.2.
Perkembangan PDB ASEAN-5 Tahun 2018-2022

Gambar 1.2. menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rata-rata 3,43% pertumbuhan per tahun paling tinggi dibandingkan dengan lainnya. Indonesia memiliki pasar dalam negeri yang kuat dan sumber daya alam yang melimpah sehingga menarik investor. Jumlah penduduk yang besar juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga berupaya memperkuat kapasitas ASEAN dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan dan dunia. Sebagai ketua ASEAN saat ini, Indonesia menetapkan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of

Growth” untuk menekankan pentingnya peran ASEAN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di kawasan (Saptati, 2023).

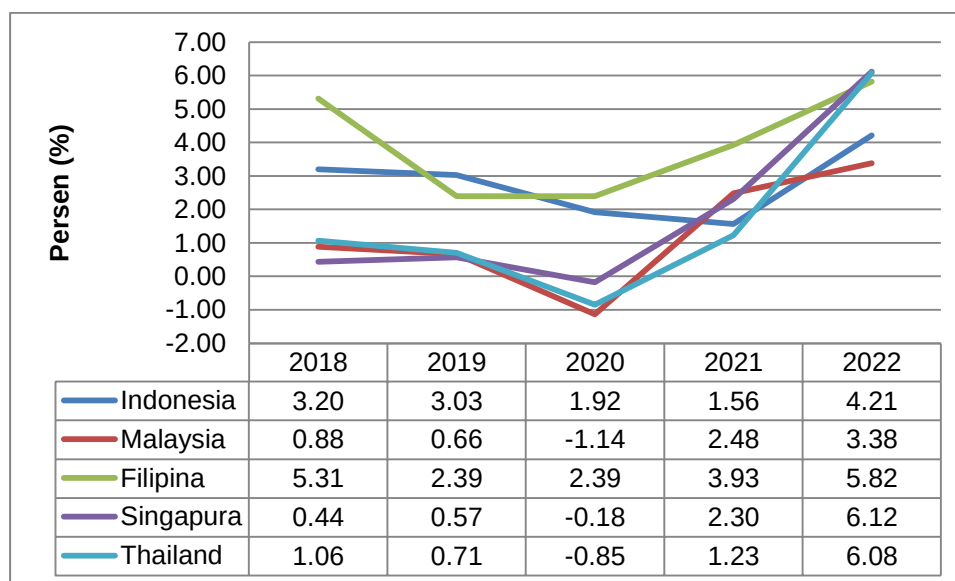
Singapura telah menjadi pusat ekonomi yang dominan di bidang industri dan jasa, dengan sektor jasa menyumbang sekitar 73,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura dan sektor industri menyumbang 26,5% pada tahun 2023 dari Produk Domestik Bruto (PDB) Singapura. Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, Singapura berhasil mengembangkan industri yang kuat dan menjadi pusat perdagangan internasional. Letak geografis Singapura yang strategis menjadikannya sebagai pusat jalur perdagangan dunia. Pelabuhan Singapura berfungsi sebagai transshipment hub, di mana banyak kapal perdagangan dari negara lain harus transit sebelum melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Ini meningkatkan volume perdagangan dan menarik perusahaan multinasional untuk beroperasi di negara tersebut (Lintang, 2023).

Pertumbuhan ekonomi paling rendah di kawasan ASEAN adalah Thailand memiliki rata-rata 0,87% pertumbuhan ekonomi per tahun paling rendah dibandingkan dengan lainnya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah ketergantungan yang besar terhadap sektor pariwisata, yang mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi COVID-19. Sektor pariwisata Thailand menyumbang sekitar 20% terhadap PDB nasional dan mempekerjakan 21% tenaga kerja. Selain itu, ekspor Thailand juga mengalami penurunan yang signifikan, terutama akibat berkurangnya kunjungan wisatawan, yang merupakan kontributor utama dalam penerimaan negara. Faktor lain termasuk ketergantungan pada sektor ekspor dan dampak perang dagang Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Thailand terpukul,

dengan pertumbuhan ekonomi yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya (Didi, 2019).

Indikator aktivitas ekonomi kedua yaitu inflasi yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen. Inflasi merupakan indikator penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, serta memiliki dampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil dianggap sebagai pra syarat bagi pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, mengendalikan inflasi sangat penting bagi kesehatan ekonomi sebuah negara. Perkembangan inflasi di negara ASEAN-5 dapat ditunjukkan pada Gambar 1.3.

Gambar 1.3. menunjukkan Tingkat inflasi di negara-negara ASEAN bervariasi, namun, beberapa negara seperti Filipina memiliki tingkat inflasi yang relatif tinggi dengan rata-rata sebesar 3,97%. Faktor-faktor determinan inflasi di negara-negara ASEAN termasuk Gross Domestic Product (GDP), Nilai Ekspor, dan Tingkat Bunga, yang diyakini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat inflasi di negara-negara ASEAN (Sanida, 2021).

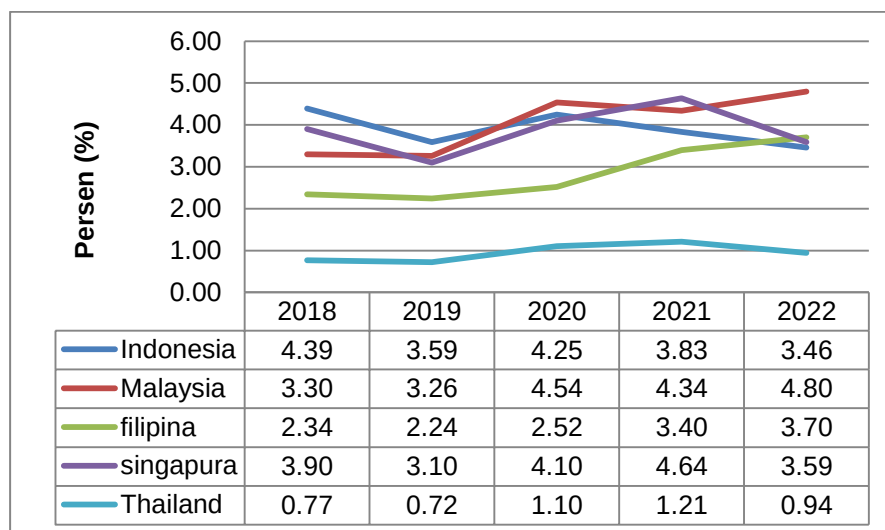


Sumber: *World Bank*, 2022, data diolah

Gambar 1.3.
Perkembangan Inflasi ASEAN-5 Tahun 2018-2022

Inflasi Malaysia tercatat rendah dengan rata-rata sebesar 1,25%, faktor yang berkontribusi terhadap hal ini adalah rendahnya kenaikan pada Kelompok Makanan & Minuman Non-Alkohol, serta penurunan harga ayam. Selain itu, tindakan menaikkan OPR juga dianggap sebagai salah satu alasan mengapa inflasi Malaysia tetap rendah. Selain itu, terdapat 12 kelompok utama yang diukur oleh Departemen Statistik Malaysia, termasuk biaya makanan dan minuman non-transportasi, perumahan, dll, yang memiliki bobot tersendiri. Alasan lain yang disebutkan antara lain adalah penetapan harga yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendukung keberlanjutan industri produksi ayam lokal (Kosmo, 2023).

Indikator aktivitas ekonomi ketiga ASEAN-5 yaitu pengangguran. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Pengangguran memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara, seperti pendapatan nasional menurun, pendapatan per kapita masyarakat rendah, produktivitas tenaga kerja rendah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penting untuk memahami respon suatu variabel ekonomi akibat *shock* pengangguran (Prayogo, 2020).



Sumber: *World Bank*, 2022, data diolah

Gambar 1.4.
Perkembangan Pengangguran ASEAN-5 Tahun 2018-2022

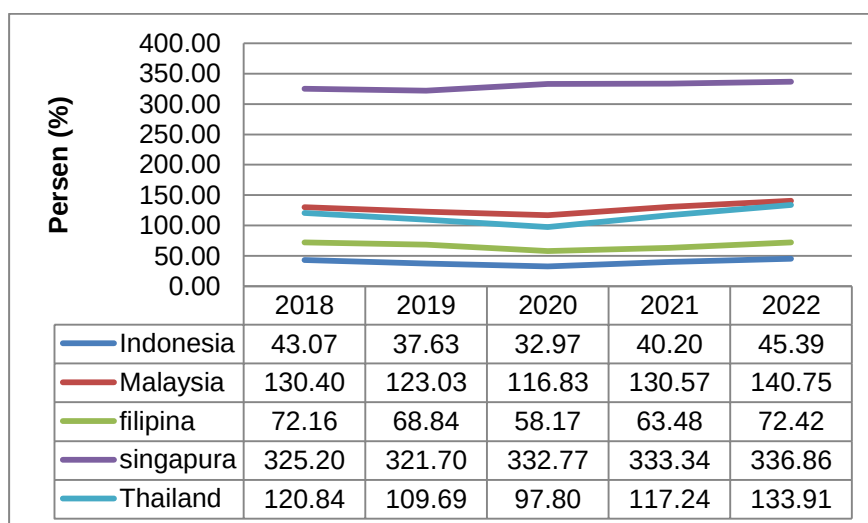
Gambar 1.4. menunjukkan bahwa Tingkat pengangguran di Malaysia dengan rata-rata 4,05% semakin meningkat akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian, Pandemi telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran. Faktor lain yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran adalah kurangnya keterampilan teknis, pemilihan pekerjaan, persiapan wawancara yang buruk, dan lemahnya kemampuan bahasa Inggris, penggunaan bahasa Inggris penting untuk komunikasi bisnis dan peluang kerja, namun banyak orang Malaysia, terutama yang tinggal di daerah pedesaan, tidak mahir menggunakan bahasa tersebut. Tingginya jumlah tenaga kerja asing di dalam negeri juga menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka pengangguran (Chang & Mansur, 2022).

Thailand memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah sebesar 0,95%. Salah satu penyebabnya adalah sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi negara Thailand dan banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, angka kelahiran rendah juga menjadi faktor lain yang menyebabkan pengangguran rendah di Thailand. Pemerintah Thailand juga melakukan berbagai kerjasama dengan lembaga internasional yang menangani masalah pengangguran (Murahni, 2014).

Indikator aktivitas ekonomi keempat ASEAN-5 yaitu keterbukaan perdagangan. Definisi keterbukaan perdagangan adalah jumlah antara nilai ekspor dengan impor suatu negara pada periode tertentu terhadap jumlah PDB suatu negara. Keterbukaan perdagangan menunjukkan indikator derajat globalisasi perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara. Semakin tinggi persentasi keterbukaan perdagangan, maka perdagangan negara tersebut

semakin terbuka. Keterbukaan perdagangan digunakan sebagai aktivitas ekonomi karena memperoleh pembukaan akses pasar yang luas, pencapaian efisiensi dan daya saing ekonomi yang tinggi disetiap negara dan mendapatkan peluang besar penyerapan tenaga kerja.

Gambar 1.5 keterbukaan perdagangan Singapura tinggi dengan rata-rata 329,98% di ASEAN karena beberapa faktor. Salah satunya adalah kekuatan sektor manufaktur Singapura yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, termasuk Indonesia. Indeks manufaktur yang lebih tinggi mencerminkan optimisme investor terhadap perkembangan manufaktur di suatu negara, yang berkontribusi pada surplus neraca perdagangan. Singapura juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang kuat, yang menjadi salah satu faktor lain yang mendukung surplus neraca perdagangan negaranya. Selain itu, hubungan dagang yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan antara Singapura dan negara-negara lain di ASEAN, serta keanggotaannya dalam berbagai kerjasama bilateral dan regional seperti ASEAN, RCEP, dan lainnya, juga turut berperan dalam menciptakan surplus neraca perdagangan yang tinggi bagi Singapura (Ragimun *et al.* 2022).



Sumber: *World Bank*, data diolah

Gambar 1.5.
Perkembangan Keterbukaan Perdagangan ASEAN-5 Tahun 2018-2022

Gambar 1.5. juga menunjukkan bahwa rata-rata keterbukaan perdagangan Indonesia rendah sebesar 39,85%. Hal ini disebabkan daya saing ekspor Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Meskipun nilai ekspor Indonesia mencatat rekor tertinggi, daya saing ekspor masih perlu ditingkatkan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa sejak penerapan keterbukaan perdagangan di ASEAN, volume perdagangan Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terdapat tantangan dalam meningkatkan daya saing ekspor non migas ke pasar ASEAN. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterbukaan perdagangan, Indonesia perlu terus meningkatkan daya saing ekspornya dan mengatasi hambatan-hambatan perdagangan yang ada (Nizar, 2014).

Secara teori dapat diuraikan keterkaitan hubungan indikator aktivitas ekonomi. Pertama hubungan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi. Inflasi memiliki dampak positif atau negatif terhadap perekonomian. Ketika bank sentral melakukan kebijakan moneter yang ekspansif dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar, maka mendorong inflasi lebih tinggi. Inflasi yang tinggi mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi tersebut masih dalam rentang target, maka inflasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun jika inflasi diatas rentang target maka dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi inflasi berdasarkan *demand pull inflation* dan *cost push inflation*.

Demand pull inflation merupakan inflasi yang terjadi karena jumlah permintaan melebihi jumlah penawaran. Artinya, peningkatan pendapatan menyebabkan daya beli meningkat, sehingga permintaan meningkat, namun stok

yang ada tidak mencukupi peningkatan tersebut, sehingga terjadi kelangkaan barang. Oleh sebab itu, tingkat harga barang atau jasa mengalami peningkatan. *Cost push inflation* merupakan inflasi yang terjadi karena kenaikan bahan baku produksi atau bisa terjadi karena hambatan proses distribusi barang. Kondisi ini menyebabkan jumlah produksi menurun, sehingga harga barang atau jasa meningkat.

Hubungan indikator aktivitas ekonomi pengangguran dan inflasi didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Phillips. Hubungan terbalik (tradeoff) antara pengangguran dan inflasi ditunjukkan menggunakan kurva Phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Naiknya permintaan agregat, maka harga akan naik. Dengan tingginya harga maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

Hubungan indikator aktivitas ekonomi pengangguran dan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Okun. Okun menjelaskan konsep hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran disebut sebagai *Okun law*. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari biasanya dikaitkan dengan penurunan tingkat pengangguran, sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari biasanya dikaitkan dengan peningkatan tingkat pengangguran.

Hubungan keterbukaan perdagangan dengan pertumbuhan ekonomi tetap menjadi salah satu isu yang menonjol baik dalam konteks teoritis maupun kebijakan. Persoalan ini semakin mendapat perhatian oleh para peneliti dalam beberapa tahun terakhir, karena negara-negara berkembang semakin banyak yang melaksanakan integrasi perdagangan internasional. Keterbukaan perdagangan dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses terhadap barang dan jasa, mencapai efisiensi dalam alokasi sumber daya dan meningkatkan produktivitas total faktor melalui difusi teknologi dan penyebaran pengetahuan Barro & Sala-i -Martin (1997) Rivera-Batiz & Romer (1991). Negara-negara dengan keterbukaan perdagangan yang lebih besar diperkirakan akan mengungguli negara-negara yang kurang terbuka. Hal ini karena negara-negara berkembang yang melakukan keterbukaan perdagangan mendapatkan banyak keuntungan melalui perdagangan dengan negara-negara maju, sehingga dapat mengintegrasikan ke dalam pasar global.

Belenkiy & Riker (2015) menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan merupakan faktor penting dalam mengurangi pengangguran. Anjum & Perviz (2016) juga mengemukakan bahwa keterbukaan perdagangan sebagai salah satu faktor dalam mengurangi pengangguran. Penelitian Nessa et al., (2021) tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya. Derajat keterbukaan perdagangan yang tinggi menunjukkan bahwa integrasi perdagangan internasional semakin tinggi, sehingga mendorong perdagangan internasional lebih luas, maka dari itu berdampak pada pasar tenaga kerja.

Secara umum diyakini bahwa perdagangan internasional menyebabkan hilangnya pekerjaan *labor intensive*, sehingga menimbulkan pengangguran.

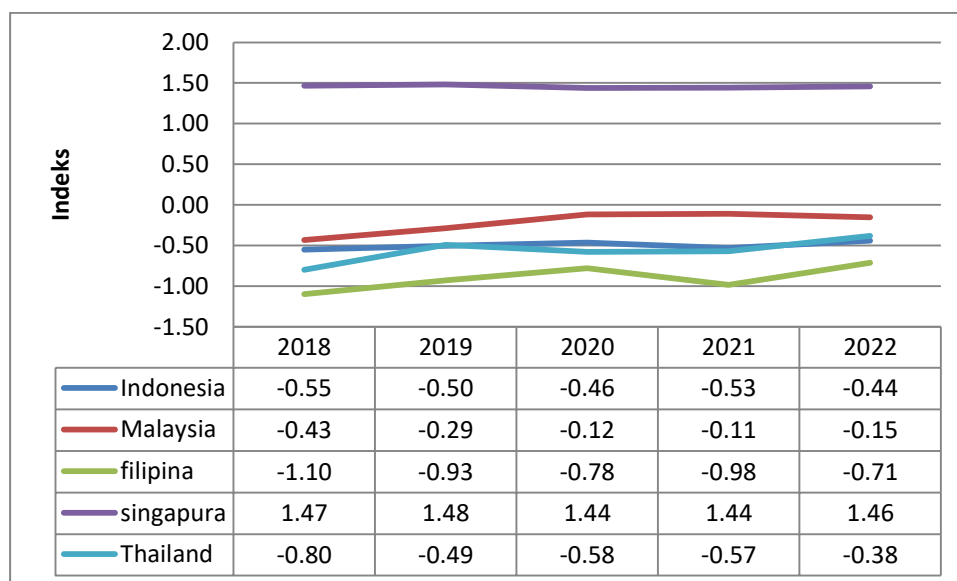
Bernard et al., (2007), juga menjelaskan bahwa keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan pergantian pekerjaan dari *labor intensive* menjadi *capital intensive*. Oleh sebab itu, penyerapan tenaga kerja semakin rendah dan pengangguran tinggi.

Hubungan keterbukaan perdagangan dan inflasi dijelaskan oleh Romer (1993). Romer (1993) percaya bahwa keterbukaan perdagangan berfungsi sebagai kendala pada perilaku inflasi, sehingga para pembuat kebijakan merasa memiliki dampak yang menguntungkan, karena dapat membatasi insentif yang diberikan kepada pelaku ekonomi. Insentif dibatasi karena kondisi makroekonomi lebih stabil akibat rendahnya inflasi. Rogoff (1995) juga menunjukkan bahwa perdagangan internasional suatu negara menjadi lebih terbuka, maka negara tersebut cenderung memiliki lebih sedikit inflasi, karena memperoleh *less surprise from inflation*. Keterbukaan perdagangan yang semakin tinggi, maka suatu negara akan menghadapi lebih banyak guncangan merugikan yang datang dari luar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Frankel & Cavallo (2004), yaitu keterbukaan perdagangan membuat negara-negara rentan krisis. Oleh sebab itu, dapat keterbukaan perdagangan dapat berdampak pada tingkat inflasi.

Kelembagaan memiliki hubungan yang sangat penting dengan aktivitas ekonomi. Kelembagaan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat, membantu menurunkan ketidakpastian, serta membaca dan memantau perkembangan perekonomian yang terus mengalami perubahan. Selain itu, teori Ekonomi Kelembagaan Baru (New Institutional Economics) menekankan pentingnya institusi dalam analisis ekonomi, baik pada tataran makro maupun mikro. Dengan demikian, keberadaan dan peran kelembagaan

sangat berpengaruh dalam pembangunan dan kelancaran aktivitas ekonomi suatu daerah (Azansyah, 2013).

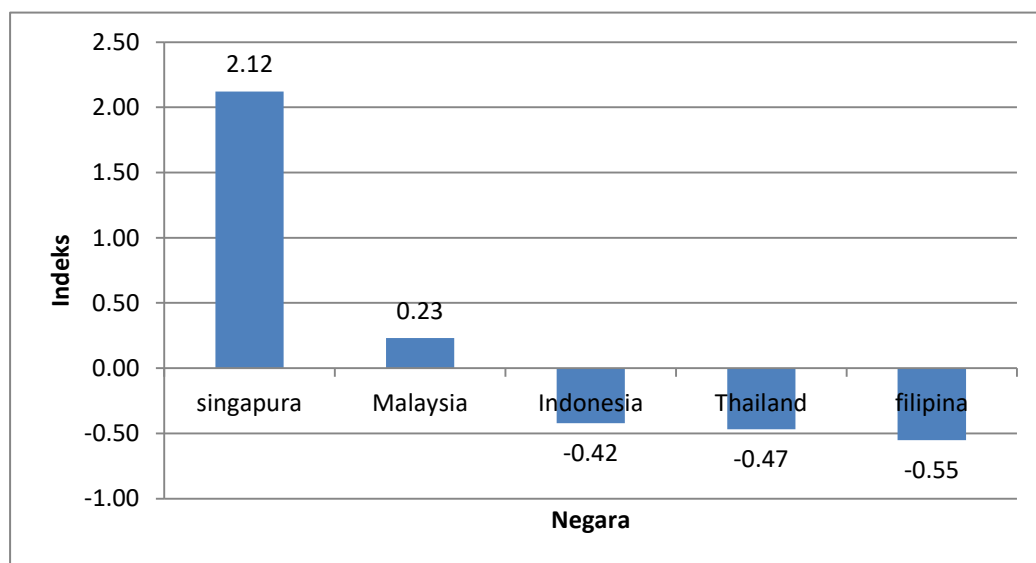
Gambar 1.6. Menunjukkan stabilitas politik di Singapura dianggap sebagai yang tertinggi dengan rata-rata 1,46% di ASEAN karena beberapa alasan. Singapura memiliki sistem politik yang stabil dan efektif dengan pemerintahan yang kuat dan terorganisir dengan baik. Kedua, Singapura memiliki tingkat korupsi yang rendah dan sistem hukum yang adil dan transparan. Ketiga, Singapura memiliki kebijakan yang konsisten dan terukur dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi, serta memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya. Keempat, Singapura memiliki pendidikan yang berkualitas dan masyarakat yang terdidik, yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menghargai pentingnya stabilitas politik. Kelima, Singapura memiliki keamanan yang baik dan sistem pertahanan yang kuat, yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya. Semua faktor ini berkontribusi pada stabilitas politik yang tinggi di Singapura.



Sumber: *World Governance Indicator*, data diolah

Gambar 1.6.
Perkembangan Stabilitas Politik ASEAN-5 Tahun 2018-2022

Stabilitas politik di Filipina dianggap rendah dengan rata-rata -0,90% dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN karena beberapa faktor. Salah satunya adalah konflik bersenjata internal, terutama di wilayah perbatasan. Selain itu, korupsi, ketimpangan ekonomi, dan isu narkoba juga berkontribusi terhadap ketidakstabilan politik. Hal ini dapat berdampak pada ketidakpastian investasi dan pertumbuhan ekonomi.



Sumber: *World Governance Indicator, 2022*, data diolah

Gambar 1.7.

Rata-Rata Indeks Korupsi ASEAN-5 Tahun 2018-2022

Gambar 1.7 menunjukkan bahwa korupsi di Singapura terendah di ASEAN dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, Singapura memiliki lembaga independen yang fokus pada pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi Singapura (CPIB), yang memiliki kewenangan penuh dalam hal ini.

Singapura memiliki peraturan yang membedakan pada pemilahan pelaku dari tindak pidana korupsi, sedangkan di Indonesia lebih membedakan pada delik yang terjadi. Selain itu, Singapura juga dikenal karena sistem hukumnya yang ketat dan efektif dalam menangani kasus korupsi. Selain faktor-faktor hukum,

Singapura juga memiliki stabilitas politik dan keamanan yang tinggi, serta transparansi dalam berbisnis, yang semuanya berkontribusi pada rendahnya tingkat korupsi di negara tersebut (Hariadi & Wicaksono, 2013).

Menurut beberapa sumber, korupsi di Filipina sangat tinggi karena beberapa faktor, seperti pengkhianatan elite terhadap rakyat melalui modus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lainnya. Kebijakan populisme penal yang dilaksanakan oleh Presiden Duterte juga menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam perburukan kualitas demokrasi di Filipina. Selain itu, partai politik di Filipina hanya merupakan kendaraan elektoral para klan oligarki untuk dapat mencapai kekuasaan. Filipina juga memiliki sistem peradilan yang terpengaruh oleh kepentingan swasta yang kuat dan korupsi (Kristal, 2021).

Kondisi politik dan aktivitas ekonomi saling terkait. Kondisi politik yang baik dapat mendukung aktivitas ekonomi. Stabilitas politik yang baik dapat membawa kepada investasi yang lebih banyak, yang kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemandirian politik juga penting, karena negara-negara yang lebih mandiri dalam mengendalikan kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketelitian dalam pengelolaan ekonomi juga penting, karena negara-negara yang lebih ketelitian dalam mengelola ekonomi mereka dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kondisi politik yang stabil dan mandiri dapat membawa kepada ketelitian dalam pengelolaan ekonomi, yang kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Haidar & Firmansyah, 2021).

Kondisi politik juga dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Kondisi politik yang stabil dapat mendukung kinerja inflasi, namun sebaliknya kondisi politik yang tidak stabil dapat memperburuk inflasi. Hal ini karena kondisi politik yang tidak

stabil dapat mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa, yang akan meningkatkan inflasi (Beetsma & Frederick, 2016).

Keterbukaan perdagangan juga memiliki hubungan langsung dengan kondisi politik dalam setiap negara tersebut. Kondisi politik yang stabil dan berdasarkan demokrasi akan membantu memfasilitasi keterbukaan perdagangan antar negara. Dalam kondisi politik yang stabil, negara akan lebih mudah untuk mengimplementasikan politik ekonomi yang memberikan kemudahan untuk perdagangan internasional, seperti liberalisasi perdagangan dan penanaman modal asing.

Selain itu, kondisi politik yang stabil juga akan membantu mengurangi risiko politik yang dapat mempengaruhi keterbukaan perdagangan antar negara. Negara dengan kondisi politik stabil dan demokratis akan lebih mudah untuk mengimplementasikan politik ekonomi yang memberikan kemudahan untuk perdagangan internasional, seperti liberalisasi perdagangan dan penanaman modal asing (Maulina, 2019).

Hubungan kondisi politik dengan pengangguran dapat dilihat dari beberapa perspektif. Pertama, kondisi politik dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh negara-negara ASEAN. Kebijakan ekonomi yang efektif dan efisien dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang kemudian dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Kedua, kondisi politik dapat mempengaruhi dampak globalisasi ekonomi terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN. Studi yang dapat menjelaskan dampak globalisasi ekonomi terhadap pengangguran di negara-negara ASEAN dapat membantu masing-masing negara merumuskan kebijakan yang efektif untuk menangani pengangguran. Ketiga, tingkat pengangguran yang terlalu tinggi dapat

menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial, yang kemudian dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pengangguran dapat menyebabkan kesendirian, kekurangan pendapatan, dan kekurangan kesehatan, yang kemudian dapat mengganggu stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat (Fitri & Uma, 2015).

Korupsi juga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Tingkat korupsi yang rendah dapat mendukung aktivitas ekonomi, namun sebaliknya semakin tinggi tingkat korupsi dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan biaya bisnis melalui harga suap, biaya manajemen dari negosiasi dengan pejabat, dan risiko dari berbagai kegiatan yang tidak bersih. Dalam sektor swasta, korupsi dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Korupsi memiliki dampak buruk terhadap aktivitas ekonomi suatu negara. Studi empiris menunjukkan bahwa korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi (Verayanti *et al.* 2019).

Dalam konteks perekonomian, korupsi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, meningkatkan kemiskinan, dan mempengaruhi pembangunan ekonomi secara negatif. Korupsi dapat mengakibatkan penggunaan sumber daya ekonomi yang tidak efektif dan efisien, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif. Dalam hal ini, penelitian dan analisis terus diperlukan untuk mengetahui hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi, serta cara untuk mengatasi korupsi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi positif di negara tersebut.

Hubungan antara korupsi dan inflasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Korupsi dapat meningkatkan inflasi

karena mengakibatkan pemerintah dan institusi-institusi ekonomi tidak dapat bekerja secara efektif dan efisien. Inflasi adalah pertumbuhan harga-harga yang terus meningkat, yang dapat menyebabkan peningkatan biaya produksi, yang kemudian dapat meningkatkan harga barang dan jasa. Korupsi dapat meningkatkan inflasi dengan cara mengurangi efisiensi produksi, mengakibatkan peningkatan biaya produksi, dan mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa. Sebagai contoh, korupsi dalam pemerintahan dapat mengakibatkan pemerintah tidak dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efektif, yang kemudian dapat meningkatkan inflasi (Trianto *et al.*, 2018).

Hubungan antara korupsi dan pengangguran terkait dengan dampak negatif yang diberikan oleh praktik korupsi terhadap ekonomi dan sistem hukum. Korupsi dapat menyebabkan kemiskinan relatif, menciptakan ekonomi biaya tinggi, dan membebankan pelaku ekonomi. Dalam kasus inefisiensi pengumpulan pajak, hubungan korupsi dan kemiskinan terjadi secara langsung. Korupsi di tingkat nasional dapat menyebabkan penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatkan pengangguran, dan menurunkan produktivitas. Dengan ini, korupsi dapat menjadi penyebab utama pengangguran, karena mengakibatkan kondisi ekonomi yang tidak stabil dan mengurangi kemungkinan bagi pekerja untuk mendapatkan pekerjaan (Dikky, 2014).

Studi ini didukung oleh banyak literatur terdahulu untuk memperkuat hasil estimasi. Penelitian pengangguran terhadap inflasi dilakukan oleh Wulansari & Prasetyo (2022) Hasil riset utama menunjukkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan baik secara langsung terhadap inflasi. Singh (2018) Korelasi antara pengangguran dan inflasi bernilai positif yaitu sebesar 0,477 dan tidak signifikan pada taraf signifikansi 10%. Ruchba & Hadiyan (2019)

Dalam jangka panjang variabel tingkat pengangguran mempunyai pengaruh positif berpengaruh terhadap variabel IHK (Indeks Harga Konsumen. Siregar *et al.*, (2023) Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengangguran terhadap tingkat inflasi di Indonesia periode tahun 2000-2021.

Pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dilakukan oleh Omran (2021) Variabel Pertumbuhan ekonomi direspon negatif oleh pengangguran. Tetapi hasil tersebut berbeda dengan penelitian Pradana (2021) Karena pertumbuhan ekonomi direspon positif. Kreishan (2011) Hasil empiris mengungkapkan hukum Okun tidak dapat dikonfirmasi untuk Yordania. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kurangnya pertumbuhan ekonomi tidak menjelaskan masalah pengangguran di Yordania. Nikolli (2014) Hasil observasi tidak menjelaskan hukum Okun untuk Albania. Penyebab utamanya adalah krisis yang terjadi saat ini yang menghambat perbaikan kondisi perekonomian.

Penelitian keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Khalid (2014) Hasil kami mengkonfirmasi kointegrasi antar seri. Apalagi dalam jangka pendek keterbukaan perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi; padahal dalam jangka panjang hubungan ini tidak ada. Lebih jauh lagi, hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hubungan ini positif dan tidak signifikan secara statistik. Wang (2017) Hasilnya menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hussein *et al.*, (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan yang diukur dengan indikator perdagangan individu dan indeks keterbukaan perdagangan gabungan berhubungan positif pertumbuhan ekonomi

dalam jangka panjang dan jangka pendek. Namun, hasil dari rolling window menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan mempunyai kaitan negatif dengan hal ini pertumbuhan ekonomi hanya dalam beberapa tahun saja. Malefane & Odhiambo (2018) Berdasarkan hasil empiris jangka panjang, penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mempunyai pengaruh positif dan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian keterbukaan perdagangan terhadap pengangguran dilakukan oleh Jaewon (2011) penelitian ini menemukan bahwa peningkatan perdagangan menyebabkan pengangguran agregat yang lebih tinggi seiring interaksinya dengan institusi pasar tenaga kerja yang kaku, padahal hal ini dapat mengurangi pengangguran agregat jika pasar tenaga kerja bersifat fleksibel. Gozgor (2013) Temuan empiris yang kuat dari perkiraan data panel menunjukkan bahwa, bersama dengan indikator makroekonomi dan ukuran pasar, semua ukuran keterbukaan perdagangan secara signifikan dan negatif dengan tingkat pengangguran. Anjum (2016) Dalam kasus negara-negara dengan banyak tenaga kerja, keterbukaan perdagangan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pengangguran dalam jangka panjang. Sementara di negara-negara dengan banyak modal, keterbukaan perdagangan mempunyai dampak positif yang signifikan pengangguran dalam jangka panjang. Nessa *et al.*, (2021) Keterbukaan perdagangan terbukti meningkatkan tingkat pengangguran ketika langkah-langkah alternatif digunakan.

Penelitian keterbukaan perdagangan terhadap inflasi dilakukan oleh Embergenov *et al.*, (2022) Keterbukaan ekspor berkorelasi negatif dengan inflasi, sementara keterbukaan impor berkorelasi positif. Babatunde (2017) Bukti empiris mengungkapkan bahwa arah tersebut hubungan antara keterbukaan dan

inflasi bersifat spesifik waktu. Meskipun ada hal positif yang signifikan dalam jangka panjang hubungan antara inflasi dan keterbukaan perdagangan, analisis sebaliknya menemukan adanya hubungan negatif yang kuat dan kokoh antara keterbukaan dan inflasi dalam jangka pendek. Selain itu, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya keterbukaan perdagangan mempengaruhi inflasi secara asimetris dan nonlinier. Hasilnya ditemukan kuat terhadap perbedaan spesifikasi. Sahu & Sharma, (2018) Secara keseluruhan, terdapat hubungan positif antara keterbukaan dan inflasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga hal ini membantah Hipotesis Romer (1993) yang menyatakan adanya hubungan terbalik antara keterbukaan dan inflasi. Thomas (2012) Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan berpengaruh positif terhadap inflasi dan memvalidasi anggapan bahwa negara-negara Karibia rentan terhadap guncangan eksternal.

Penelitian kondisi politik terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Naleef & Masih (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketidakstabilan politik memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kamaiah *et al.*, (2022) Hasil dari model kami menunjukkan bahwa stabilitas politik meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alhamran *et al.*, (2022) Hasil empiris memberikan bukti bahwa stabilitas politik mempunyai dampak positif terhadap perekonomian pertumbuhan ekonomi riil negara-negara GCC. Cervantes & Villaseñor (2019) Hubungan antara stabilitas politik dan ekonomi pertumbuhannya positif dan signifikan, terutama ketika perubahan per pendapatan kapita dan politik tingkat stabilitas dan non-kekerasan diamati.

Penelitian kondisi politik dengan inflasi dilakukan oleh Downing & Sawalha (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi ketidakstabilan politik

memiliki efek yang bervariasi terhadap volatilitas inflasi, dengan ketidakstabilan rezim dan ketidakstabilan pemerintah memiliki dampak signifikan, Barugahara (2014) studi ini menunjukkan hasil yang positif pengaruh ketidakstabilan politik yang signifikan secara statistik terhadap volatilitas inflasi.

Penelitian kondisi politik dengan keterbukaan perdagangan dilakukan oleh Naina *et.al*, (2020) Temuan menyimpulkan bahwa ketidakstabilan politik sangat menghambat perdagangan internasional dalam jangka panjang. Apalagi di dalam jangka pendek, ketidakstabilan politik secara signifikan menghambat ekspor. Tidak ditemukan dampak signifikan dari ketidakstabilan politik impor di negara tersebut jangka panjang. Joseph *et al.*, (2021) Dari temuan tersebut, hubungan negatif antara stabilitas politik dan perdagangan barang tidak signifikan, sedangkan hubungan negatif antara stabilitas politik dan keterbukaan perdagangan (ekspor plus impor) adalah signifikan.

Penelitian kondisi politik dengan pengangguran dilakukan oleh Naleef & Masih (2018) Ketidakstabilan politik memiliki dampak negatif terhadap pengangguran mengikuti pola ketidakstabilan politik. Penelitian juga menemukan adanya hubungan jangka panjang antara ketidakstabilan dan pengangguran. Kamga (2022) hasilnya menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik meningkatkan pengangguran kaum muda, setengah pengangguran, dan kurangnya pemanfaatan tenaga kerja di Afrika sub-Sahara.

Penelitian tentang pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Lutfi & Diartho (2020) Hasil penelitian ditemukan bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan GDP per kapita, Uddin & Rahman (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Uddin & Rahman

(2022) mengungkapkan bahwa korupsi mempunyai pengaruh negatif terhadap PDB per kapita. Spyromitros & Panagiotidis (2022) Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang.

Pengaruh korupsi terhadap inflasi dilakukan oleh Özşahin & Üçler (2017) Hasil estimasi menunjukkan bahwa korupsi yang tinggi meningkatkan tingkat inflasi, dan terdapat hubungan sebab akibat yang searah antara korupsi dan inflasi di sepuluh negara sampel. Abdollahi *et al.*, (2012) Temuan kami berdasarkan model regresi data panel mendukung pandangan adanya hubungan positif antara korupsi dan inflasi pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi korupsi semakin tinggi pajak inflasinya. Al-Marhubi, (2000) Hasil penelitian menunjukkan negara-negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi akan mengalami inflasi yang lebih tinggi. Mohamed & Sassi, (2015) Temuan kami memberikan bukti adanya hubungan yang signifikan dan positif antara tindakan korupsi di seluruh negara dan inflasi. Negara-negara dengan lingkungan yang korup dan tata kelola yang buruk menggunakan seigniorage sebagai sumber pendapatan yang mendorong ekspansi moneter lebih tinggi sehingga meningkatkan tingkat inflasi. Setelah mengendalikan jumlah uang beredar, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa korupsi mempengaruhi inflasi melalui jalur lain. Hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa dampak negatif korupsi terhadap inflasi berbeda-beda di setiap negara sampel. Kurangnya lembaga-lembaga yang kuat dan berkomitmen dalam negara-negara berkembang dan berkembang merupakan poin penting dalam menjelaskan kesenjangan ini.

Pengaruh korupsi terhadap pengangguran dilakukan oleh Zumba *et al.*, (2021) Temuan kami menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik mempunyai

dampak positif, namun tidak signifikan secara statistik terhadap pengangguran. Bouzid, (2016) Makalah ini menemukan bahwa, setelah mengendalikan berbagai faktor makroekonomi dan kelembagaan, perkembangan praktik korupsi cenderung meningkatkan tingkat pengangguran di kalangan kaum muda.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat ditemui bahwa masih banyak beberapa perbedaan mengenai hasil penelitian Interaksi aktivitas ekonomi, stabilitas politik dan korupsi. Oleh karena itu, studi ini mencoba untuk meneliti Interaksi aktivitas ekonomi, stabilitas politik dan korupsi di ASEAN-5.

Tipe kesenjangan penelitian dalam studi ini yaitu dalam penelitian ini terdapat *research gap* yang termasuk pada kategori *theoretical gap* dan *empirical gap*, yang dimana secara teoritis terdapat teori-teori dan kerangka pemikiran pada riset sebelumnya serta terdapat kelemahan dan keterbatasan yang kurang pada teori maupun kerangka pemikiran sebelumnya dan terdapat perbedaan dalam hasil empiris yang telah dilakukan penelitian sebelumnya. Pembaharuan dalam studi ini yaitu menambahkan beberapa variabel kelembagaan seperti stabilitas politik dan korupsi. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Interaksi aktivitas ekonomi, stabilitas politik dan korupsi di ASEAN-5.

Kontribusi yang diberikan oleh studi ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap penulis dan pembaca yang membaca penelitian ini sebagai dasar pertimbangan serta penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Interaksi aktivitas ekonomi, stabilitas politik dan korupsi di ASEAN-5.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan masalah dalam studi ini sebagai berikut:

1. Apakah ada interaksi aktivitas ekonomi dengan stabilitas politik dan korupsi di ASEAN-5 ?
2. Variabel apakah yang memberikan kontribusi dinamis paling tinggi setiap model ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirinci, maka tujuan penelitian dalam studi ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis interaksi aktivitas ekonomi, stabilitas politik, dan korupsi di ASEAN-5.
2. Untuk menguji dan menganalisis kontribusi dinamis setiap paling tinggi setiap model.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian dalam studi ini sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi atau masukan untuk pengambilan keputusan yang optimal yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi dengan stabilitas politik dan korupsi di ASEAN-5.
2. Bagi Pembaca, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang berguna serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas ekonomi dengan stabilitas politik dan korupsi di ASEAN-5.